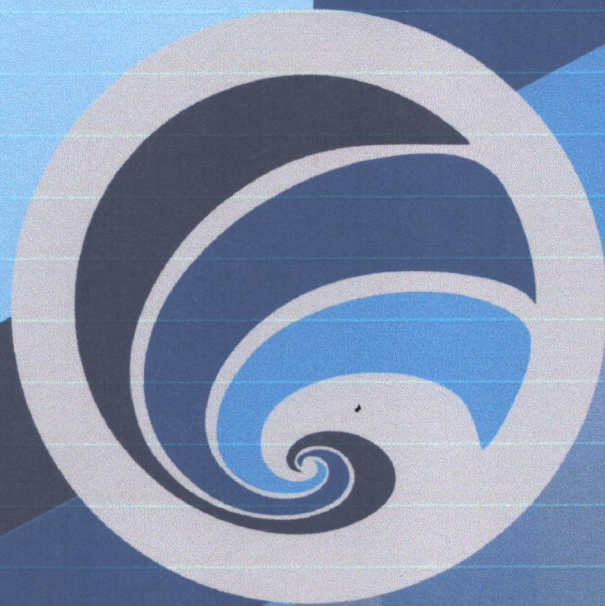


# Laporan Kinerja

## TRIWULAN II



**KABID KOMUNIKASI  
PUBLIK DAN PERSANDIAN**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

**2019**



## BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan II tahun anggaran 2019. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Bidang Komunikasi Publik dan Persandian merupakan salah satu Bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 11 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Komunikasi Publik dan Persandian adalah sebagai berikut :

- Tugas :  
Bidang Komunikasi Publik dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Komunikasi Publik dan Persandian.
- Fungsi :
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;

3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan media komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan media komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;
6. Pengawasan menara telekomunikasi;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui Pengelolaan Media Publik dan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial	1. Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	20%
		2. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	60%

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Dalam kurun waktu mulai 1 April sampai dengan 30 Juni 2019, dari 2 indikator kinerja tersebut telah tercapai, yakni :

- Target Triwulan II persentase Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang memiliki blog sebesar 10,2% telah tercapai dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah KIM yang memiliki blog}}{\text{Jumlah Kelurahan+Desa}} \times 100\% \Rightarrow \frac{21}{205} \times 100\% = 10,2\%$$



- Target Triwulan II Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 16,4% telah tercapai dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah}}{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah yang direncanakan}} \times 100\% \Rightarrow \frac{12}{73} \times 100\% = 16,4\%$$

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Bidang Komunikasi Publik dan Persandian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui Pengelolaan Media Publik dan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial	1. Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	5%	10,2%	204%
	2. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	15%	16,4%	109,3%

Dalam realisasi Triwulan II ini pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan aktifnya para anggota KIM Desa se-Kabupaten Lumajang dalam berkoordinasi untuk pembuatan Blog.

Sedangkan tingginya Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi lebih disebabkan oleh tingginya kesadaran OPD untuk lebih memanfaatkan teknologi yang ada untuk menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 akan diuraikan mengenai program-program yang mendukung pencapaian tersebut, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3  
*Cost per outcome* Bidang Komunikasi Publik dan Persandian Tahun 2019 - Triwulanan II

No	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	1. Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	729.031.000	135.246.000	18,55%	5%	10,2%	204%	185,45%
2	Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	2. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	84.825.000	31.235.965	36,82%	15%	16,4%	164,4%	109,3%



Capaian target kinerja melebihi besaran target yang harus dicapai pada Triwulanan II tahun anggaran 2019 sedangkan realisasi anggaran yang masih kecil disebabkan oleh belum dilaksanakannya beberapa kegiatan sosialisasi pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, sedangkan realisasi anggaran perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah masih terbilang rendah dikarenakan belum dilaksanakannya beberapa kegiatan pemeliharaan barang modal. Capaian penyerapan anggaran di Triwulanan II tahun anggaran 2019 tersebut bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan II tahun anggaran 2019, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Bidang Komunikasi Publik dan Persandian terhadap upaya pencapaian 2 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja  
Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Aktif melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap KIM Desa se-Kabupaten Lumajang.	Dilakukan mulai awal April s.d. Juni 2019.
2.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Aktif melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah terkait.	Dilakukan mulai awal April s.d. Juni 2019.

#### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi ;
2. Aktif berkoordinasi dengan KIM Desa se-Kabupaten Lumajang ;
3. Aktif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait ;
4. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov. Jatim.

#### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
  - Laporan kurang baik
  - Laporan segera diperbaiki
  - Target dan realisasi diteliti ulang
  - Capaian diteliti ulang
  - Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....



### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan II Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi Publik dan Persandian berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jatim dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 2 target adalah melalui :
  - a. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi ;
  - b. Aktif berkoordinasi dengan KIM Desa se-Kabupaten Lumajang ;
  - c. Aktif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait ;
  - d. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov. Jatim.

Mengetahui,  
ATASAN LANGSUNG

Lumajang, 05 Juni 2019

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI  
PUBLIK DAN PERSANDIAN



**DEWI SAWITRI, S.Kom**

Penata Tk. I

NIP. 19800813 200501 2 016



**IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19750921 199603 1 002